

DILOMASI PUBLIK AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA MELALUI AUSTRALIA-MUSLIM EXCHANGE PROGRAM TAHUN 2016 – 2018

Nicholaus Chrisye Irlando Masela

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : nichowamena@gmail.com

Abstract

This research seeks to describe the background of Public Diplomacy towards Indonesia through the Australia-Indonesia Muslim Exchange Program for 2016 - 2018. In addition, to find out what activities have been carried out by the AIMEP program from 2016 - 2018; To find out what obstacles were faced and what evaluations were obtained in the implementation of the AIMEP program conducted by Australia towards Indonesia; and To review the results of the implementation of the Australia-Indonesia Muslim Exchange Program for 2016 - 2018 on Australian and Indonesian diplomatic relations.

The theoretical studies used include foreign policy, national interests, diplomacy, public diplomacy, and Islam and international relations. While the method used in this study is qualitative.

The results of this study indicate that Australia seeks to strengthen its relationship with Indonesia at the grassroots level through the Muslim exchange program (AIMEP) of the two countries. Efforts to strengthen the relationship were carried out by discussing and various views related to the issue of tolerance, education, terrorism, Islamophobia, the role of Muslims, harmony with nature, and religious life in Australia that produce positive image on Australia. Furthermore, the positive image of AIMEP alumni contributes to strengthening Australia-Indonesia relations at the grassroots level which gradually contributes to elite-Australia-Indonesia relations and strengthening Australia's position in the Asia Pacific or the Indo-Pacific.

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan latar belakang Diplomasi Publik terhadap Indonesia melalui *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 - 2018*. Selain itu, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh program AIMEP dari tahun 2016 – 2018; Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dan evaluasi apa saja yang diperoleh dalam pelaksanaan program AIMEP yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia; dan Untuk mengkaji hasil pelaksanaan *Australia –Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 - 2018* terhadap hubungan diplomasi Australia dan Indonesia.

Adapun kajian teoritis yang digunakan mencakup kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, diplomasi, diplomasi publik, serta Islam dan Hubungan Internasional. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Australia berusaha mempererat hubungannya dengan Indonesia di tingkat akar rumput melalui program pertukaran Muslim (AIMEP) kedua negara. Adapun upaya mempererat hubungan tersebut dilakukan dengan berdiskusi dan berbagai pandangan terkait isu toleransi, pendidikan, terorisme, islamophobia, peranan muslimah, harmoni dengan alam, dan kehidupan beragama di Australia yang menghasilkan imej positif. Lebih lanjut lagi, imej positif yang dimiliki oleh para alumni AIMEP berkontribusi terhadap penguatan hubungan Australia-Indonesia di tingkat akar rumput yang secara bertahap berkontribusi terhadap hubungan Australia-Indonesia di tingkat elit dan penguatan posisi Australia di Asia Pasifik atau Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Pertukaran Muslim, Australia, Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh suatu negara kerap kali memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar negeri untuk ikut terlibat di dalamnya. Namun, disadari atau tidak, diplomasi publik tersebut memiliki motif politik dan strategis yang ingin diperoleh negara, seperti menjaga dan meningkatkan hubungan kedua negara. Motif politik dan strategis tersebut dapat diwujudkan dengan mendekati tokoh masyarakat/pemangku kepentingan (aktor non-negara) akar rumput luar negeri – diplomasi publik. Salah satu medianya adalah program pertukaran tokoh-tokoh keagamaan kedua negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Perwakilan Diplomatik Negara tersebut dengan lembaga-lembaga pendidikan/universitas.

Aktivitas diplomasi publik Australia terhadap Indonesia tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Australia memposisikan Asia Pasifik sebagai kawasan strategis. Pada tahun 2008, Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd mengumumkan sikap politik luar negerinya untuk meningkatkan kerjasama multilateralisme di Asia Pasifik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berkembang institusi kerjasama kawasan yang semakin mempererat hubungan negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Timur; seperti ada keberadaan ASEAN, ASEAN+3, ARF, APEC, East Asia Summit dan ASEAN-CHINA Free Trade Area. Kondisi tersebut memiliki nilai strategis karena tidak hanya mempererat dan meningkatkan keamanan di antara anggota, namun memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi Australia (<https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2009-10/10rp13.pdf> diakses pada 13 Mei 2018).

Indonesia memiliki nilai politik dan ekonomi yang penting bagi Australia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Australia untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia. Secara politik, Indonesia dinilai memiliki peran signifikan sebagai *regional leader* di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam forum kawasan ASEAN (Smith, 1999: 239). Selain itu, Indonesia pun aktif terlibat dalam forum-forum kerjasama kawasan yang telah disebutkan di atas. Pada konteks kontemporer, hubungan Australia-Indonesia dapat dilihat sebagai kunci stabilitas

Asia Pasifik. Pandangan tersebut disampaikan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono

(<http://www.tribunnews.com/australia-plus/2017/10/26/hubungan-australia-indonesia-kunci-stabilitas-asia-pasifik> diakses pada 13 Mei 2018):

“Kedua negara menghadapi lingkungan geopolitik yang menjadi lebih cair dan bahkan mudah berubah dalam beberapa tahun terakhir.... kepercayaan strategis menurun tajam, persaingan kembali terjadi, dan pendekatan berbahaya menjadi pilihan, banyak ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam politik global.... Indonesia dan Australia dapat bekerjasama untuk memastikan keseimbangan dinamis di kawasan ini, di mana kemitraan tidak akan menghasilkan konflik baru, ketegangan lebih besar, dan kembalinya divisi merugikan era perang dingin.”

Lebih lanjut, dalam aspek ekonomi, Indonesia menempati urutan ke-dua sebagai sumber impor atau pasokan bagi Australia. Adapun beberapa produk yang diekspor Indonesia pada tahun 2016 meliputi kebutuhan industri (US\$ 23.98 miliar), produk farmasi (US\$ 7 miliar), produk medis (US\$ 7.15 miliar), batu berharga (US\$ 7.01 miliar), peralatan olahraga dan mainan (US\$ 2.12 miliar), pesawat (US\$ 2.03 miliar), makanan (US\$ 1.72 miliar), produk kimia (US\$ 1.65 miliar), minuman (US\$ 1.5 miliar), mesin (US\$ 25.01 miliar), mesin elektronik (US\$ 18.47 miliar), produk besi/baja (US\$ 3.82 miliar), dan barang lainnya (US\$ 1.6 miliar). Kemudian, total perdagangan antara Australia-Indonesia mencapai US\$ 342.18 miliar pada periode Januari – November 2016, hal tersebut mengalami penurunan 4.23% dibandingkan periode 2015 yang mencapai US\$ 357.29 miliar. Meskipun terdapat penurunan volume perdagangan antara tahun 2015 dan 2016, namun hal tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa hubungan kedua negara merenggang karena kedua negara mencatatkan nilai yang cukup besar dari aspek perdagangan (<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2018/02/06/report-1517900324.pdf> diakses pada 13 Mei 2018).

Kedua penjelasan di atas memiliki keuntungan tersendiri bagi Australia dalam aspek politik maupun ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Australia tidak sebatas melalui saluran diplomasi tradisional atau melalui kerangka kerjasama antar negara yang sifatnya elitis. Australia pun menggunakan saluran lain, yakni *government to people* atau *people to people* dengan tujuan mendekati masyarakat Indonesia. Pentingnya peran masyarakat (*people*) dalam hubungan internasional didasarkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengubah kebijakan suatu negara dan potensial menjadi pengambil kebijakan di masa depan. Oleh karena, Australia gencar melaksanakan kegiatannya diplomasi publiknya, seperti menggunakan media massa, perguruan tinggi (Byrne dan Hall, 2013: 37 – 41), atau budaya (Mar, 2014: 47). Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada program pertukaran tokoh-tokoh Islam/Muslim kedua negara (*Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia melalui Australia-Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 – 2018?”

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengkaji Diplomasi Publik Australia Terhadap Indonesia melalui Australia –Indonesia Muslim Exchange Program Tahun 2016 - 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya: 1) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum dan para pengambil kebijakan terkait pelaksanaan diplomasi publik Australia di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia. 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum dan para pengambil kebijakan bahwa kegiatan diplomasi publik Australia melalui pertukaran individu yang pelaksanaannya dilakukan oleh aktor non-negara (dalam hal ini lembaga pendidikan/Universitas Paramadina dan

individu) memiliki tujuan politik untuk mempererat hubungan Australia-Indonesia. 3) Menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan Studi Hubungan Internasional, khususnya mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Pasifik, serta Diplomasi dan Negosiasi.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor*, memiliki berbagai macam pengertian. Perwita dan Yani menjelaskan bahwa Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hal ini berarti hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh aktor suatu negara dalam kehidupan antarnegara. Adanya saling ketergantungan dari kedua negara Australia dan Indonesia mendorong adanya kerjasama seperti yang didelegasikan dalam kesepakatan bilateral kedua negara, hendaknya kerjasama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Australia memiliki prioritas solidaritas dan pengaruh terhadap Indonesia melalui MEP untuk membangun pertukaran para tokoh muda muslim dan memahami agama muslim di Indonesia, dan bagi Indonesia dengan kesempatan studi ke Australia dapat meningkatkan intelektual mereka sehingga dapat membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

2.2 Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia

internasional. Kebijakan luar negeri telah mempunyai beberapa definisi antara lain sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain (Perwita dan Yani, 2005: 31 – 47). Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam kebijakan luar negeri.

Brown dan Ainsley, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri erat kaitannya dengan negara. Karena hanya negara yang mampu membuat suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Secara tradisional, kebijakan luar negeri berfokus pada keputusan negara untuk berperang atau tidak. Namun, pada kontemporer ini, hubungan internasional mencakup isu yang sangat luas. Sehingga, kebijakan luar negeri memiliki dimensi yang sangat luas di mana cakupannya tidak hanya meluas sampai isu *low politics* atau *non-traditional issues* (Brown dan Ainley, 2005: 69). Namun unit analisisnya tidak lagi sebatas negara secara tunggal, juga merambah pada unit-unit analisisnya seperti politik domestik, faktor idiosinkratik, budaya strategi, politik birokrasi – yang semuanya dipayungi dalam sub-disiplin Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) (Hudson, 2014: 4). Implikasinya adalah, kebijakan luar negeri tidak lagi dilihat sebagai produk politik elit politik, namun meliputi proses yang ada di dalamnya.

2.3 Peranan Organisasi Internasional

Istilah Diplomasi Publik pertama kali dipopulerkan oleh Edmund Gullion dari *Fletcher School of Law and Diplomacy* di Universitas Tufts pada tahun 1960an. Pentingnya diplomasi publik dalam politik dunia disebabkan bahwa publik memiliki peranan penting dalam mencapai kepentingan nasional. Jan Mellisen mengatakan diplomasi publik merupakan usaha untuk mempengaruhi masyarakat atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara (Melissen, 2005:4). Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations (G to G)*, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people (G to P)* atau bahkan *people to people relations (P to P)*, yakni target diplomasi publik secara umum adalah

publik luar negeri dan secara spesifik organisasi atau grup non-pemerintah dan individu.

Diplomasi publik merupakan proses interaksi secara langsung dengan publik luar negeri guna mengajak masyarakat tersebut untuk tertarik dan menggali nilai yang ditawarkan dari diplomasi publik tersebut. Dalam hal ini diplomasi publik merupakan proses komunikasi pemerintah dengan publik luar negeri dalam upayanya untuk memberikan pemahaman tentang ide bangsa, ide-ide, institusi dan budaya, yang merupakan bagian dari kebijakan dan tujuan nasionalnya (Melissen, 2005:12).

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut negara membangun hubungan, memahami suatu negara dengan warga negara lain, mengkomunikasikan pandangan suatu negara terhadap masyarakat luar negeri, mengkoreksi misinterpretasi dan berusaha melihat isu umum untuk dijadikan kepentingan bersama. Secara umum diplomasi publik memiliki tiga karakteristik, yakni *information* (memanaje dan mendistribusi informasi secara berkala bahkan ketika terjadi krisis – jangka pendek), *influence* (Melakukan kampanye yang persuasif sehingga akan menimbulkan perubahan sikap terhadap target publik luar negeri/populasi – jangka panjang), *engagement* (Membangun hubungan untuk memperoleh kepercayaan dan saling memahami antar masyarakat) (Kelley dalam Snow dan Taylord, 2009;76).

2.4 Islam dalam Hubungan Internasional

Islam dan Hubungan Internasional merupakan dua istilah yang berbeda. Adiong berpendapat bahwa hubungan kedua konsep/istilah tersebut kerap kali tidak diposisikan sebagai hal yang setara (2013: 4). Ketidaksetaraan tersebut disebabkan adanya pandangan penstudi Hubungan Internasional barat yang melihat Islam dari kacamata orientalis. Artinya, Islam sebagai entitas budaya, ideology, dan politik kerap kali dinilai dan dihakim merujuk nilai-nilai universal Barat. Hal tersebut memunculkan permasalahan karena penilaian dilakukan tidak merujuk pada ukuran yang semestinya (*proper*) dan memunculkan bias. Konsekuensinya, keberadaan potensi-potensi Islam terhadap perkembangan Studi Hubungan Internasional

cenderung diabaikan oleh para penstudi HI arus utama (Adiong, 2013: 8).

Pada pandangan yang lebih luas, konsepsi tentang Islam mengkritik tentang pengkajian dan praktik hubungan internasional yang *European-centric*. Hal tersebut dapat dipahami bahwa kemunculan sistem Westphalia yang menjadi rujukan bagi aktor negara dalam bertindak berasal dari Eropa. Namun, dominasi pandangan barat tersebut digugat oleh para penstudi non-Barat yang mempertanyakan “di mana suara Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin” (Acharya, 2014: 648). Lebih lanjut, Acharya berpendapat wilayah-wilayah yang kerap kali diposisikan sebagai objek dalam Studi Hubungan Internasional tersebut memiliki potensi untuk menjadi subjek untuk menjelaskan dirinya dan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional secara umum. Hal serupa pun terjadi dengan Islam dalam konteks Internasional.

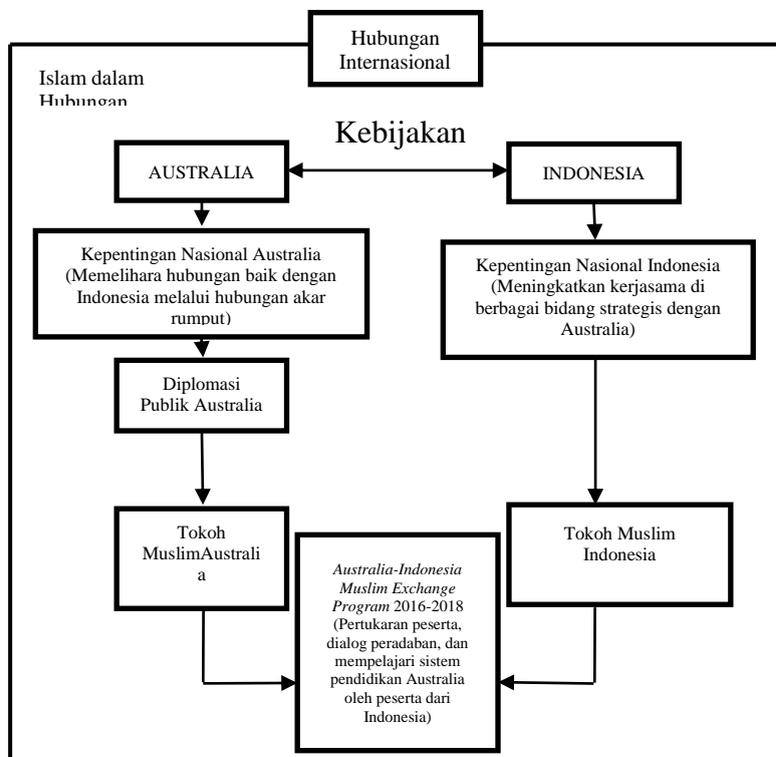
Sheikh berpendapat bahwa penggunaan Islam dan pengalaman *statecraft* kaum Muslim as *‘ignored of IR knowledge’* dapat mempertegas status hubungan Islam dan Hubungan Internasional pada tingkatan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah gagasan-gagasan Islam digunakan dalam praktik-praktik politik dunia. Pendapat didasarkan pada fakta empirik di mana semakin menguatnya keberadaan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, penguatan peranan organisasi OKI, serta adanya perhatian global terhadap politik Islam kontemporer (Sheikh, 2016: 1). Artinya, secara teoritik Islam memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan Studi Hubungan Internasional (SHI), sedangkan secara praktik keberadaan Islam menjadi salah satu hirauan utama hubungan internasional. **Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Mulyana (2018: 3) yang menyatakan Islam menyediakan perspektif alternatif dalam Studi Hubungan Internasional non-mainstream yang dapat memperkaya keberadaan HI itu sendiri. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa keberadaan religi sebagai alat analisis tidak mengabaikan keberagaman teori, pendekatan dan paradigm yang sudah ada sebelumnya.** Artinya, keberadaan religi yang dalam hal ini adalah Islam, memungkinkan untuk pengayaan atau pengembangan keilmuan HI yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada saat ini belum dapat diselesaikan di tingkat teoritis ataupun praktis.

2.5 Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran (Gambar 2.1) dimulai dari hubungan internasional yang tidak lagi dibatasi interaksi tradisional antara aktor negara. Pada pemikiran yang lebih luas, hubungan internasional memungkinkan aktor non-negara dalam hal ini adalah masyarakat luar negeri untuk terlibat secara aktif dalam praktik-praktik hubungan internasional yang dibingkai dalam kegiatan diplomasi publik. Aktivitas diplomasi publik ini seringkali ditujukan oleh suatu negara terhadap masyarakat luar negeri untuk memperoleh output politik tertentu – baik untuk jangka panjang atau jangka pendek.

Pada penjabaran yang lebih kongkrit, yakni dalam konteks penelitian ini; Australia memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Bagi Australia hubungan bilateral tersebut memiliki nilai strategis yang tidak hanya untuk pendek, namun untuk jangka panjang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan strategis tersebut Australia merumuskan kebijakan luar negerinya dengan pelaksanaannya menggunakan instrument diplomasi publik. Adapun isu yang digunakan dalam diplomasi publik tersebut adalah Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Australia merancang kegiatan *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program 2016 - 2018*. Program tersebut diharapkan dapat memberikan timbal-balik terhadap Australia dalam hubungannya dengan Indonesia.

Di tingkat teknis, pelaksanaan diplomasi publik Australia terhadap Indonesia tidak dilakukan oleh para elit politik, namun dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau kebudayaan yang memiliki kompetensi relevan dengan tema atau isu diplomasi publik yang di atas. Dalam hal ini, Australia memiliki *Australia-Indonesia Institute* (AII) – sebuah lembaga yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan Australia-Indonesia di tingkat akar rumput dengan mengangkat isu-isu *low politics*. Lebih lanjut, dalam melaksanakan program AIMEP, AII bekerjasama dengan salah satu institusi pendidikan Indonesia untuk menyelenggarakan AIMEP yang secara teknis AII bertugas menyediakan pendanaan serta menyeleksi peserta AIMEP dari Australia, sedangkan institusi pendidikan Indonesia bertugas menyeleksi peserta AIMEP dari Indonesia.



3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Hubungan Australia - Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 1949. Pada saat itu, Indonesia mulai membuka hubungan luar negeri dengan Australia pada tahun 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa *ad Interim* yang sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra. Lebih lanjut, posisi Dr Oesman digantikan oleh Oetojo Ramelan dengan status sebagai Duta Besar Penuh Indonesia untuk Australia. Pada periode awal dibukanya hubungan diplomatik kedua negara, posisi Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia cenderung berpindah-pindah dari wilayah ke wilayah lain. Baru pada bulan Agustus 1971, Indonesia memiliki tempat permanen yang saat ini berada di wilayah Yarralumla – suatu wilayah atau lingkungan perwakilan-perwakilan negara asing di Canberra.

Selama 69 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia, kedua negara telah mengalami dinamika hubungan diplomatik. Adanya peristiwa domestik atau luar negeri kedua seringkali menempatkan hubungan Australia-Indonesia di tingkat paling rendah. Meskipun demikian, kedua negara mampu memenej hubungan yang turun untuk kembali. Keberhasilan korps diplomatik kedua negara dalam menormalisasi dan menempatkan Australia-Indonesia sebagai mitra strategis ditandai dengan adanya berbagai kerjasama, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan kerjasama kekonsuleran (<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54> diakses pada 7 Januari 2019).

Di bidang politik, para elit Australia dan Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan *good-neighborliness* dengan meningkatkan kerjasama melalui kesepakatan instrumen legal, seperti *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (deklarasi yang dilakukan oleh Australia-Indonesia guna meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, keamanan, bidang pembangunan, martim, dan hubungan antar masyarakat) pada tahun 2005 dan *Lombok Treaty* pada tahun 2006 (Kerjasama keamanan antara Australia-Indonesia dengan mendasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai panggung politik untuk kegiatan separatisme). Adanya kerjasama di bidang politik kedua negara ini menjadi fondasi utama dalam mengembangkan kerjasama-kerjasama berikutnya yang bersifat *low-politics* (<https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.aspx> diakses 7 Januari 2019).

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara penerima *Official Development Assistance* (ODA) terbesar dari Australia. Dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sebesar A\$ 3.7 miliar pada periode 2008 – 2009. Indonesia memperoleh A\$ 467 juta atau meningkat A\$3.2 juta dari periode sebelumnya. Adapun rincian bantuan ODA tersebut mencakup *Country Program* (A\$ 182,7 juta) dan *Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (A\$ 230,9). Adapun skema untuk menurunkan anggaran tersebut diturunkan

dalam bidang *education and scholarship; governance; human security and stability; infrastructure and regional development; Aceh rehabilitation and health*. Kemudian, dalam skema *Australia-Indonesia Partnership for Recounstruction and Development*, Australia telah membangun setidaknya 2000 SMP di berbagai wilayah Indonesia (<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54> diakses pada 25 Desember 2018).

Kemudian, di bidang sosial-budaya Australia dan Indonesia memiliki ikatan yang kuat, baik dalam hubungan antar lembaga (seperti adanya kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi kedua negara) atau individu (masifnya mahasiswa Indonesia yang belajar di kampus Australia atau meningkatkan arus mobilisasi manusia kedua negara). Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidaknya terdapat 106 peserta dari Australia yang mengikuti beasiswa Darmasiswa (1976 – 2007) dan 8 peserta yang mengikuti Beasiswa Seni dan Budaya (2004 – 2008). Selain itu, pada tahun 2008, *Australia Indonesia-Institute* menyelenggarakan program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* dengan total 8 peserta yang berasal dari Indonesia. Merujuk data di atas, terdapat ketertarikan yang dimiliki akar rumput untuk saling mengetahui satu sama lain ([https://www.kemlu.go.id/id/lembar-informasi/Pages/Pengumuman-Penerima-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-\(BSBI\)-2019.aspx](https://www.kemlu.go.id/id/lembar-informasi/Pages/Pengumuman-Penerima-Beasiswa-Seni-dan-Budaya-Indonesia-(BSBI)-2019.aspx) diakses pada 15 Februari 2019).

Adanya berbagai kerjasama kedua negara di berbagai bidang menunjukkan hubungan Australia-Indonesia cenderung baik. Hal tersebut merupakan potensial untuk mengembang kerjasama dan hubungan lebih intens baik di tingkat elit (*government to government*) ataupun di tingkat akar rumput. Pada saat ini hubungan bilateral kedua negara semakin intens dengan meningkatkan status diplomatiknya menjadi *strategic comprehensive partnership* dengan lima pilar utama (Hasil wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018);

1. Meningkatkan ekonomi dan mengembangkan kemitraan.
2. Menghubungkan masyarakat.
3. Mengamankan kepentingan bersama Australia-Indonesia (baik di tingkat bilateral atau regional).
4. Kerjasama maritim

5. Berkontribusi terhadap keamanan dan kesejahteraan di Indo-Pasifik.

Sehingga dengan adanya kerjasama kemitraan komprehensif kedua negara diharapkan mampu memenuhi kepentingan nasional masing-masing tanpa negeasikan satu sama lain. Kondisi tersebut juga menjadi modal penting bagi kedua negara untuk semakin meningkatkan hubungan di semua sektor, baik melalui program baru atau program yang sudah ada (yang dalam penelitian adalah AIMEP) (<https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.aspx> diakses pada 15 Februari 2019).

3.1.2 Sejarah Australia-Indonesia Muslim Exchange Program

The Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) merupakan pertukaran masyarakat antara Indonesia-Australia (*people to people exchange*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan *Australia-Indonesia Institute* (AII). Program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* pertama kali dibentuk pada tahun 2002 untuk membangun persahabatan, pemahaman, dan kerjasama antara masyarakat Australia-Indonesia. Hal tersebut dibelakangi bahwa dalam pandangan Australia, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan dengan adanya program pertukaran dapat membangun persahabatan dan pemahaman antara komunitas muslim kedua negara (<https://ausindomep.com/about/> diakses pada 7 Januari 2019).

Secara historis, *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* dimulai pada tahun 2002, pada saat itu delegasi pertama dari Indonesia datang ke Australia yang didalamnya termasuk Abdul Mu'ti (Sekjen Muhammadiyah di masa akan datang). Pada tahun 2004 program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* mulai berkembang, peserta program tersebut bukan hanya tokoh muslim dari Indonesia namun sudah memasukan tokoh Muslim Australia (termasuk Bayram Aktepe, *President of Islamic Council of Victoria* di masa akan datang). Lalu memasuki tahun 2005, Australia mengirimkan beberapa voluntirnya untuk membantu korban Tsunami Aceh 2004. Di tahun 2007, *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* mulai membuka programnya untuk profesi yang lebih luas, tidak

hanya pemuka agama namun juga profesi lain seperti jurnalis tv ikut di dalamnya dan pada tahun 2009 peserta dari Indonesia timur mulai ikut program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*.

Pada tahun 2012 sebagai peringatan satu dekade *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*, Australia mulai membuka program serupa dengan mendekati diri kepada Malaysia melalui *Australia-Malaysia Muslim Exchange Program* dengan *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* sebagai model dasarnya. Lalu pada tahun 2015, Abdul Mu'ti terpilih sebagai Sekjen Muhammadiyah. Terpilihnya Mu'ti sebagai Sekjen Muhammadiyah memberikan manfaat tersendiri bagi Australia dan meningkatkan hubungan kedua negara. Kemudian pada tahun 2016 *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* mengadakan reuni di Melbourne dan Sydney hingga saat ini program tersebut masih ada

Adapun tujuan dari program *Australia-Muslim Exchange Program* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan saling pengertian, kerjasama, dan toleransi antara Australia dan Indonesia.
2. Membangun persaudaraan antara masyarakat Muslim di Indonesia dan Australia;
3. Meningkatkan kesadaran tentang kemajemukan dan dialog antar agama di Australia dan Indonesia

Lebih lanjut, peserta yang terlibat dalam program AIMEP merupakan tokoh-tokoh kunci atau pemimpin masa depan di dalam komunitasnya. Para peserta yang telah diseleksi pada akhirnya akan melakukan kunjungan ke Australia. Di sana para peserta akan bertemu dengan tokoh-tokoh organisasi keagamaan terkemuka, mengunjungi universitas-universitas, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan masyarakat biasa untuk belajar tentang kehidupan mereka sehari-hari.

Hingga saat ini (tahun 2018), program AIMEP memiliki lebih dari 200 alumni yang berasal dari kedua negara yang terus berkontribusi aktif dalam bidangnya masing-masing. Keberadaan Alumni ini pun menjadi krusial karena memiliki dan berbagi jaringan profesional yang berkontribusi terhadap pengembangan dan dinamika hubungan Australia-Indonesia. Pada tingkat teknis, penyelenggaraan *Australia-Indonesia Muslim*

Exchange Program dilakukan oleh institusi pendidikan kedua negara dimana penyelenggaraan dari pihak Australia berada di tanggungjawab *Australia Indonesia Connection* (sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Melbourne) sedangkan di Indonesia berada di tanggung jawab Universitas Paramadina. Meskipun masing-masing negara memiliki koordinator yang bertugas sebagai panitia lokal kegiatan *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*, namun pada tingkat teknis masing-masing negara harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia serta *Australia-Indonesia Institute* sebagai penanggung jawab dan pemberi dana kegiatan (<https://ausindomep.com/about/> diakses pada 7 Januari 2019).

Dipilihnya Universitas Paramadina sebagai mitra kerja *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* memiliki dasar tersendiri. Di Indonesia, banyak sekali lembaga pendidikan tinggi yang menggunakan identitas Islam sebagai *benchmark*-nya namun hanya sedikit kampus Islam yang dipandang sebagai Islam moderat atau Islam terbuka yang salah satunya adalah Universitas Paramadina. Meskipun jika ditinjau dari visi-misi, Universitas Paramadina tidak berbeda jauh dengan kampus lain yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan ke-Islam-an. Namun, Universitas Paramadina memiliki imj yang erat kaitannya dengan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang berwawasan terbuka, toleran, dan plural, seperti Nurcholis Madjid, Ulil Abshar Abdalla, Abdurrahan Wahid, dan Muhammad Quraish Shibab. Imej dan nilai yang menjunjung tinggi toleransi, pluralisme, dan keterbukaan ini menjadi penting bagi Australia untuk mengoptimalkan capaian programnya. Karena, jika mitra kerja *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* yang ada di Indonesia tidak memiliki nilai yang sama dengan Australia maka capaian yang ingin diperoleh bisa tidak optimal atau gagal.

Lebih lanjut, dalam proses seleksinya pihak mencantumkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi calon peserta sebagai berikut:

1. Pria (batas 23 tahun – 40 tahun) dan wanita (batas usia 23 – 45 tahun)
2. Aktif di kegiatan organisasi keIslaman.
3. Mampu berpartisipasi aktif di dalam diskusi berbahasa Inggris.

4. Memiliki nilai TOEFL min 450 (IELTS 5.0) diutamakan di atas TOEFL 500 (IELTS 5.5)
5. Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan dokumen penunjang (curriculum vitae, pernyataan motivasi, surat rekomendasi, dll).

Maka dari itu, merujuk pada pemaparan di atas. Dipilihnya tokoh-tokoh berpengaruh muslim yang terkemuka dibidangnya dapat ditafsirkan bahwa Australia berkeinginan membangun jaringan profesional dan politik untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di masa sekarang ataupun di masa depan. Pemilihan Universitas Paramadina sebagai mitra kerja lokal ditujukan untuk mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh Australia kepada para peserta program. Pada tingkat praktis, masing-masing peserta baik individu ataupun berkelompok akan fokus pada isu-isu yang sudah ditentukan dan berbagi pengalaman tentangnya yang kemudian pengalaman tersebut akan dibagikan kepada komunitas yang ada di Indonesia (<https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/09/25/9084/-p-program-pertukaran-tokoh-muda-muslim-australia-indonesia-kembali-dibuka-p-.html> diakses pada 15 Februari 2018).

Sedangkan adanya syarat-syarat administrasi tertentu yang harus dipenuhi peserta ditujukan sebagai salah satu komponen untuk mendukung keberhasilan program; adanya pembatasan umur ditujukan untuk menjangkau para pemimpin potensial Indonesia di masa depan; terbukanya pilihan gender pria dan wanita mengindikasikan bahwa Australia tidak melakukan diskriminasi; mampu aktif berbahasa Inggris diperlukan agar para peserta dapat berpartisipasi secara optimal; Memiliki toefl yang mumpuni sebagai bukti kefasihan Bahasa Inggris; sedangkan syarat administrasi seperti CV, surat motivasi dkk digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih kandidat yang terbaik.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan konflik etnis. Sesuai dengan

masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui AIMEP 2016 - 2018. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan AIMEP, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia serta beberapa sumber karya ilmiah atau penelitian terdahulu maupun data yang didapat dari media massa maupun situs resmi internet, data yang di dapat kemudian akan di implementasikan terhadap teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Bentuk-Bentuk Kegiatan Australia-Indonesia Muslim Exchange Program 2016 - 2018

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Australia-Indonesia Muslim Exchange Program 2016 – 2018 mencakup diskusi (berinteraksi dan bertukar gagasan dengan penduduk Australia terkait pengetahuan dan pengalaman isu tertentu), observasi (mengamati dan mengalami peristiwa sosial selama mengikuti program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program 2016 – 2018*) dan kunjungan (mendatangi tempat-tempat yang penting yang relevan dengan teman bahasan). Setelah mengikuti program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*, Para peserta *Muslim Exchange Program* yang berasal dari Indonesia memiliki beragam pandangan terhadap keikutsertaanya dalam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia tersebut. Berikut di bawah ini akan dipaparkan beberapa pandangan yang terkait dengan kegiatan yang diikuti dan isu-isu penting yang berkaitan dengan toleransi, pendidikan, terorisme, islamophobia, peranan muslimah, harmoni dengan alam, dan kehidupan beragama di Australia (Syukur, 2015: 78 - 86).

4.2.1.1 Diskusi

4.2.1.1.1 Isu Terorisme

Terorisme merupakan salah hirauan global, termasuk bagi Australia. Ahmad Imam Mujaid Rais pernah diwawancari oleh Radio ABC Australia tentang pandangannya terkait terorisme. Menurutnya, terorisme bukanlah bagian dari dan posisi tersebut umat Islam

dirugikan karena adanya tindakan sekelompok orang melakukan aksi kekerasan atas nama identitas kolektif. Menanggapi pandangan dominan tersebut, dalam berbagai kesempatan Rais memperkenalkan kegiatan remaja Muslim Indonesia yang anti-kekerasan yang selama satu dekade terakhir ini sering dikaitkan dengan kekerasan karena peristiwa 9/11.

Merujuk pada catatannya, Muniruddin menjelaskan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi muslim pasca peristiwa 9/11 dan bom bali yang mengharuskan umat muslim untuk mengambil peran publik, yaitu membuka diri terhadap publik dalam diskursus-diskursus intelektual. Mengutip pernyataan Abdullah Saeed (salah satu peserta diskusi), umat Islam harus banyak meluruskan dan memberi informasi tentang berbagai pandangan buruk dan negatif yang terdapat di berbagai negara muslim, khususnya yang berkaitan dengan Islam di Afghanistan.

Lebih lanjut, Saeed mengatakan tidak ada penafsiran yang tunggal dalam Islam. Setiap wilayah memiliki penafsiran yang relative tentang Islam yang kemudian diterjemahkan sesuai konteks budaya masing-masing. Hasilnya adalah, setiap negara yang menggunakan Islam sebagai dasarnya akan menghasilkan produk hukum dan kebijakan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, maka tidak heran jika terdapat perbedaan dalam menjalankan syariah antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pada prinsipnya, selama hukum dan kebijakan yang dibuat mendasarkan pada semangat keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan kejujuran maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Islam. Namun jika mengarah pada 'pemaksaan' dan kekerasan, maka sulit untuk masuk sebagai Syariah Islam (Muniruddin, 2015: 70).

Diskusi

Isu Harmoni Dengan Alam

Sari Wulandari, salah satu peserta MEP lainnya menulis pengalamannya terkait suku Koorie – merupakan sebutan untuk suku Aborigin yang tinggal di wilayah New South Wales dan Victoria. Secara historis, suku Aborigin telah ada di Australia sejak 50.000 tahun yang lalu dan pada kontemporer ini jumlah berada di kisaran 3% dari total populasi Australia. Suku Koorie tidak mengenal agrikultur dimana mereka tidak mengenal sistem bercocok tanam sehingga pola kehidupan mereka nomaden (berpindah-pindah). Wilayah yang mereka tempati

biasanya berada di tempat yang dekat dengan air, seperti sungai atau sumber mata air dan untuk memenuhi kebutuhan makanannya mereka berburu kangguru, burung, atau ikan. Untuk perlengkapan berburu, suku Koorie membuat berbagai senjata tradisional dari kayu panah, pentungan, dan boomerang. Meskipun hidupnya berpindah-pindah, suku Koorie selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu contohnya adalah, suku Koorie selalu mengambil sumberdaya alam sesuai kebutuhan. Aktivitas berburu dilakukan hanya untuk kebutuhan makan, bukan hobi atau rekreasi. Mereka juga mengambil manfaat keberagaman hayati seperti pohon dengan cara bijak. Meskipun kayu merupakan kebutuhan pokok untuk membangun rumah, kebutuhan perapian, senjata, dan bahan baku perahu. Suku Koorie tidak pernah menebang pohon apalagi membakar hutan. Pemeunuhan kebutuhan kayu dilakukan dengan mengambil dahan dan ranting pohon yang sudah jatuh tertiuip angin atau diperoleh dari pohon yang tumbang. Pada prinsipnya, apa yang alam berikan mereka manfaatkan. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara alam dan manusia (Wulandari, 2015: 267).

Observasi

Isu Toleransi

Toleransi merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat majemuk atau multietnis. Dalam konteks ini, Annisa Kumala salah satu peserta *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* menyatakan bahwa hal penting yang dia peroleh dari kunjungan ke Australia adalah memperoleh pengetahuan bahwa untuk memahami keberagaman harus dilakukan dengan sikap terbuka dan toleran yang pada akhirnya akan membawa dunia ini pada kedamaian. Lebih lanjut, dalam pandangan Kumala tidak ada yang lebih indah selain hidup damai dan rukun, adanya kondisi saling menghargai meskipun terdapat perbedaan diantara masyarakat. Kumala pun memandang kekerasan atas nama agama yang hadir selama ini merupakan hasil penafsiran agama secara egois dan keliru. (Kumala, 2015: 484).

Isu Islamphobia

Lanny Octavia mencatat bahwa setelah terjadi peristiwa 9/11 dan Bom Bali, muncul ketakutan terhadap Islam atau Islamphobia di berbagai belahan dunia. Atas kejadian tersebut, Islam dinilai sebagai entitas monolitik dan

secara prinsip dianggap berbeda serta bertentangan dengan nilai-nilai modern demokrasi dan liberal. Di sisi lain terdapat xenophobia di kalangan umat Islam yang menilai terorisme sebagai bagian dari ‘konspirasi Zionis-Salibis’ (sebuah imajinasi dari kelompok muslim yang menganggap adanya kegiatan terencana yang dilakukan umat Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam) yang dilakukan tidak hanya menghancurkan imej Islam di dunia, namun juga menggerus fondasi sosial-ekonomi-politik dunia Islam. Maka dari itu untuk menghadang prasangka dan phobia, diperlukan perjumpaan langsung agar setiap pihak dapat mengetahui, memahami, dan kemudian saling menerima satu sama lain. (Octavia, 2015: 440).

Isu Harmoni Keberagaman

Deni Wahyudi Kurniawan melihat salah satu faktor Australia menjadi negeri yang masyarakatnya beragam (multietnis) karena dianggap sebagai tanah harapan (*Land of Hope*). Secara historis, Australia merupakan wilayah dimna bangsa pertama kali datang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehadiran bangsa Inggris di tanah Australia diikuti oleh etnis bangsa lain yang menilai Australia sebagai wilayah yang mampu memberikan kesempatan dan kehidupan yang lebih baik pula. Maka dari itu, tidak heran jika banyak etnis dan bangsa yang secara bertahap bermigrasi ke wilayah Australia. Ketertarikan etnis lain untuk bermigrasi ke wilayah Australia menjadi respon positif dari otoritas setempat. Setelah Perang Dunia II, pemerintah Australia memiliki kebijakan untuk mendatangkan 6 juta migran ke Australia. Sejak saat itu, berbagai migran yang berasal dari 200 negara telah menjadikan Australia sebagai tanah airnya sendiri (Kurniawan, 2015: 100).

Isu Kehidupan Beragama di Australia

Peserta MEP lainnya, Ridwan Al-Makassary membandingkan sejumlah karakteristik antara Papua dan Australia yang secara spesifik Muslim Papua dan Muslim Australia. Al-Makassary membaginya ke dalam tiga poin (Al-Makassary, 2015: 280):

1. Secara historis, wilayah Papua dan Australia merupakan suatu kawasan yang satu sebelum dipisahkan karena adanya benturan gempa bumi, dan guncangan hebat pada ribuan tahun sebelumnya. Maka dari itu, tidak mengherankan jika

wilayah Australia dan Papua memiliki kesamaan karakteristik fauna, flora, dan lanskap wilayah.

2. Persamaan kedua terletak pada posisi Islam sebagai kelompok minoritas. Namun kedatangan Islam di masing-masing wilayah berbeda satu sama lain. Di Papua, agama Islam masuk pada abad ke-16 yang dibawa oleh Kerajaan Bacan dan Tidore. Di sisi lain, agama Kristen memasuki Papua pada tahun 1885 oleh dua penginjil Jerman – Rasul Ottow dan Gessler di Pulau Mansinam Manokwari. Kehadiran dua agama besar di Papua tersebut telah menunjukkan adanya kebersamaan, toleransi dan menjadikan Papua sebagai wilayah peradaban. Di sisi lain, keberadaan Islam Australia dapat dilacak ketika *Muslim Cameleers* dari Afghanistan dan India membawanya ke tanah harapan tersebut.
3. Dalam persentase tertentu beberapa kota utama di Australia seperti Canberra, Sydney, serta Melbourne merupakan kota yang inklusif, rukun, dan erat kaitannya dengan praktik toleransi. Hal tersebut juga sama dengan beberapa kota di Papua, khususnya Jayapura yang sedang mengarah menjadi kota pluralis – dengan semboyan *Hen Tecahi Yoo Onomi T'mar Ni Hanased* (satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan).

Kunjungan

Isu Pendidikan

Cara pengajaran di Australia dan Indonesia pada prinsipnya memiliki metode yang berbeda. Jika di Indonesia kebanyakan guru agama adalah beragama Islam, maka di Australia tidak demikian. Ketika melakukan kunjungan ke sekolah Islam di negara bagian Canberra (*Balcombe Grammar School*), Fauza Mahsyudi yang berasal dari Pesantren Modern Gontor menulis tentang pengalamannya bahwa selama berkunjung di Canberra ia bertemu dengan tenaga pengajar yang berasal bukan beragama Islam. Pengajar non-muslim tersebut tidak mengajarkan materi keagamaan, namun mata pengajaran secara umum. Melihat fenomena tersebut, Mahsyudi menyimpulkan tentang pentingnya mengajarkan pengetahuan agaman dan pengetahuan umum secara beriringan. Penggunaan model pengajaran yang dilakukan Australia tersebut selaras dengan prinsip Islam yang melihat fenomena alam sebagai bagian dari keyakinan dan tidak bisa

dipisahkan. Lebih lanjut, adanya fakta penggunaan tenaga pengajar non-muslim di lingkungan sekolah Islam dapat ditafsirkan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dan kedisiplinan yang dimiliki oleh umat Islam juga penduduk Australia terlepas apa pun kepercayaan mereka. Dalam konteks ini, Islam dan Australia memiliki nilai yang selaras.

Artinya, meskipun tenaga pengajar bukan beragama Islam namun mereka tetap menerapkan nilai moral Australia yang sesuai dengan Islam. Sedangkan untuk pelaksanaan mata pelajaran agama, diberikan waktu selama satu jam setiap harinya. Pada tingkat teknis, aktivitas belajar-mengejar antara guru dan siswa memanfaatkan teknologi terbaru, bahkan dari tingkat taman kanak-kanak sudah menggunakan perangkat terbaru. Sehingga, tidak sedikit siswa-siswi berprestasi di sekolah Islam yang dikunjungi oleh Mahsyudi tersebut - baik di tingkat domestik, nasional, regional atau internasional (Mahsyudi, 2016: 329).

Isu Peran Muslimah

Siti Rohmanati Fitriani melihat seringkali melihat dakwah sebagai kegiatan ceramah agama, kegiatan ritual agama bersama (tabligh akbar), pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pandangan Fitriani mulai berubah ketika ia bertemu dengan lembaga keagamaan *Australia Muslim Women Association* (AMWA). Setelah bertemu dengan lembaga dakwah tersebut, Fitriani melihat bahwa dakwah yang dilakukan tidak dilakukan dalam format yang konservatif, namun ada modernisasi tentang bagaimana cara berdakwah. Dakwah tidak hanya sebatas penyampaian ajaran-ajaran agama, namun juga penerapan dari ajaran agama seperti penyediaan tempat berlindung bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Di AHWA, Fitriani melihat para pendamping yang membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan berusaha untuk mencari solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Pada praktiknya, proses pendampingan dilakukan dengan cara non-formal. Salah satu contoh kongkritnya adalah pelaksanaan konseling yang dilakukan dengan metode dialog di sela para korban melakukan aktivitas lain (seperti memasak atau menenun). Pada proses dialog ini, para pendamping memberikan penguatan mental yang berdasarkan ajaran agama. Artinya, apa yang

dilakukan oleh pendamping tersebut merupakan bentuk spiritual konseling. Karena sifatnya non-formal maka format konseling dialogis tadi dapat membangun kenyamanan karena adanya kondisi setara antara pendamping dan korban (Fitriani, 2015: 379).

4.2 Kendala Pelaksanaan AIMEP 2016 - 2018

Kendala yang muncul pada program AIMEP 2016 – 2018 adalah bagaimana cara media menampilkan Islam yang justru sering kali membuat Islam pada posisi yang kurang baik, sehingga terdapat kecenderungan masyarakat untuk memahami Islam sebagai bagian dari teroris. Di Balcome Grammar School, sebuah sekolah Kristen yang berlokasi di Mount Martha, Victoria, para peserta AIMEP 2016 - 2018 bertemu dengan anak-anak sekolah yang begitu tertarik mengetahui soal Islam. Ketika para peserta AIMEP meminta mereka menjelaskan tentang Islam dalam satu kata, anak-anak sekolah di Balcome Grammar School menjawabnya *"This is not what I think. But what I get through media is, Islam is Terrorist"*. Masyarakat Muslim Australia tentu harus berjuang keras untuk memberikan bukti dan mengedukasi masyarakat Australia lainnya bahwa Islam bukanlah agama yang mendukung terorisme. Tentu ini tidak mudah, disitulah tantangannya. Yang paling tepat menjelaskan Islam itu sendiri adalah Muslim Australia (Forum Alumni MEP Australia-Indonesia, Hidup Damai di Negeri Multikultur, 2015: 153).

Adapun kendala lainnya dari AIMEP misalnya kurangnya informasi dari media sosial, televisi serta media cetak. Sehingga masyarakat dan pelajar kurang mengetahui adanya kegiatan Muslim Exchange Program dari kedua Negara tersebut. Serta kurangnya publikasi dari AIMEP sendiri. Di sisi lain, komunitas Muslim Australia masih menghadapi sejumlah permasalahan yang ada di negara. Klaim tersebut diperkuat oleh para peserta AIMEP dari Australia. Seperti Nada Kalam, salah satu peserta AIMEP mengatakan sering berada pada posisi sulit ketika terjadi peristiwa besar di Australia. Pada saat terjadi teror Sydney dengan skema penyanderaan pada tahun 2014, semua publik Australia tertuju pada komunitas Muslim secara seketika dan posisi Muslim dalam struktur masyarakat Australia semakin termarginalkan. Artinya, meskipun terdapat keterbukaan dalam

Masyarakat Australi, masih ada persepsi diskriminasi dari masyarakat Australia terhadap komunitas Muslim itu sendiri, khususnya ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa signifikan yang membawa symbol keagamaan atau identitas religi. Di sisi lain, komunitas muslim di Australia tidak memiliki sarana untuk menangkal wacana yang berkembang secara pesat dalam Masyarakat Australia yang memosisikan Muslim sebagai kelas kedua dan selalu termarjinalkan. Sehingga tidak berlebihan jika peneliti menyimpulkan kendala yang dimiliki oleh AIMEP bukan terletak pada program AIMEP karena diplomasi public melalui pertukaran pejaran tersebut memang didesain sedemikian rupa untuk menampilkan sisi positif dari Australia. Permasalahan utama adalah kondisi real yang dihadapi oleh komunitas Australia itu sendiri. Sehingga suka tidak suka harus diakui terdapat segmentasi tersendiri terhadap kelas sosial yang ada di Australia, khususnya hubungan horizontal antara kepercayaan mayoritas dan kepercayaan minoritas – dalam hal ini adalah Muslim diposisi minoritas.

Permasalahan lain dari program AIMEP adalah waktunya yang dapat dibilang relative sebentar. Pada prinsip, kegiatan AIMEP tidak berbeda jauh dengan program pertukaran lainnya yang bertujuan mempromosikan nilai positif yang dimiliki oleh negaranya. Namun, waktu yang relative sebentar tersebut tidak sedikit menimbulkan mispersepsi, khususnya peserta dari luar negeri. Tidak sedikit program diplomasi publik yang menghasilkan kesan positif dari pihak luar, namun tidak sedikit juga program diplomasi public yang mengalami kegagalan sehingga menjadi boomerang bagi negara penyelenggara. Kondisi tidak menguntungkan tersebut muncul ketika peserta mengambil kesimpulan bahwa kondisi yang ditunjukkan penyelenggara berbeda jauh dengan kondisi nyata di lapangan. Pada kasus ekstrim, sifat negative tersebut bisa bertransformasi pada kebencian dan mengarahkan pada tindakan kekerasan (baik secara ideology atau melalui tindakan nyata).

4.3 Hasil Pelaksanaan AIMEP 2016 - 2018

Kegiatan Australia-Indonesia Muslim Exchange Program tahun 2016 – 2018 menarik banyak peserta untuk terlibat di dalamnya. Kegiatan pertukaran antar muslim tersebut

tidak hanya meningkatkan komunitas muslim kedua negara, namun memberikan pengalaman tersendiri para peserta tentang kondisi tempat yang mereka kunjungi, terkait dengan tema-teman tertentu yang menjadi hirauan peserta. Secara garis besar, kegiatan *Australia – Indonesia Muslim Exchange Program* mencakup diskusi, observasi dan kunjungan. Di dalam kegiatan tersebut terdapat tema-tema yang dijadikan sebagai bahan kegiatan yang mencakup; terorisme, harmoni dengan alam, toleransi, islamophobia, harmoni keberagaman, kehidupan beragama di Australia, pendidikan, dan peran muslim.

Merujuk pada hasil kegiatan *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* dengan pandangan-pandangan peserta dari Indonesia terkait tema yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan bahwa program tersebut mampu membangun pandangan positif peserta dari Indonesia terhadap Australia. Dalam pandangan-pandangannya melalui esai, para peserta cenderung menjadikan nilai-nilai Australia yang multikultur dan toleransi sebagai pijakan yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Artinya, Australia berhasil membangun citra positifnya terhadap akar rumput Indonesia yang berpotensi menjaga hubungan strategis antara Australia-Indonesia di tingkat elit dan di masa akan datang.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* pertama kali dibentuk pada tahun 2002 untuk membangun persahabatan, pemahaman, dan kerjasama antara masyarakat Australia-Indonesia. Hal tersebut dibelakangi bahwa dalam pandangan Australia, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan dengan adanya program pertukaran *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* dapat membangun persahabatan dan pemahaman antara komunitas muslim kedua negara.

Adapun tujuan dari program *Australia-Muslim Exchange Program* mencakup; Meningkatkan saling pengertian, kerjasama, dan toleransi antara Australia dan Indonesia; Membangun persaudaraan antara masyarakat Muslim di Indonesia dan Australia; dan meningkatkan kesadaran tentang kemajemukan dan dialog antar agama di Australia dan Indonesia. Lebih lanjut, peserta yang terlibat dalam program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* merupakan tokoh-tokoh

kunci atau pemimpin masa depan di dalam komunitasnya.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* 2016 – 2018 mencakup diskusi, observasi dan kunjungan. Setelah mengikuti program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program*, Para peserta Muslim Exchange Program yang berasal dari Indonesia memiliki beragam pandangan terhadap keikutsertaanya dalam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia tersebut. Isu-isu yang diangkat dalam program *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* 2016 - 2018 mencakup; toleransi, pendidikan, terorisme, islamophobia, peranan muslimah, harmoni dengan alam, dan kehidupan beragama di Australia. Di tahap tersebut, para peserta akan menemukan keunggulan yang dimiliki oleh Australia serta menemukan kesamaan antara Australia-Indonesia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan imej positif peserta *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* terhadap Australia. Lebih lanjut lagi, imej positif yang dimiliki oleh para alumni *Australia-Indonesia Muslim Exchange Program* berkontribusi terhadap penguatan hubungan Australia-Indonesia di tingkat akar rumput yang secara bertahap berkontribusi terhadap hubungan Australia-Indonesia di tingkat elit dan penguatan posisi Australia di Asia Pasifik atau Indo-Pasifik.

Sebagai rekomendasi, para pengambil kebijakan, masyarakat awam dan secara khususnya peserta kegiatan diplomasi publik harus peka terhadap kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara lain karena kegiatan yang dikemas sedemikian menarik disadari atau tidak memiliki agenda politik tertentu dan mampu mengubah pandangan para peserta program terhadap penyelenggara kegiatan.

Daftar Pustaka

A. Acuan dari Buku:

Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

ICRC. 2009. *ABC Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: PT Antaresindo Pratama.

_____, 2012. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*. Jakarta: PT Antaresindo Pratama.

_____, 2013. *ICRC Annual Report 2012*.
Jenewa: ICRC

_____, 2014. *ICRC Annual Report 2013*.
Jenewa: ICRC

_____, 2015. *ICRC Annual Report 2014*.
Jenewa: ICRC

_____, 2016a. *Kenali ICRC*. Jakarta: ICRC

_____, 2016b. *ICRC Annual Report 2015*.
Jenewa: ICRC

_____, 2017a. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC

_____, 2017b. *ICRC Annual Report 2016*.
Jenewa: ICRC

_____, 2018. *ICRC Annual Report 2017*.
Jenewa: ICRC

Darmayadi, dkk. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara

Narwoko, Dwi & Suyanto, Bagong. 2005. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Grup.

Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Alumni.

Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT Refika Aditama.

_____, 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suryokusumo, Sumaryo. 2010. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Salemba.

Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Little, Richard & Smith, Michael. 2006. *Perspectives on World Politics*. New York: Routledge.

Lewis, David & Kanji, Nazneen. 2009. *Non-Governmental Organizations and Development*. New York: Routledge.

Starke, G. John. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sawe, Benjamin Elisha. 2017. Largest Ethnic Groups in Myanmar (Burma). Melalui: <http://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-myanmar-burma.html>[3 Maret 2018]

B. Rujukan Karya Ilmiah

Aung, Tun Tun. 2007. *An Introduction to Citizenship Card under Myanmar Citizenship Law*. 38:273-278.

Kadam, Umesh 2006. Political and Social Sciences and International Law. *Makalah Lokakarya Pengajaran HHI dalam Kurikulum FISIP (OL)*. 9-11

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2015. Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013. *Kajian Wilayah*. 1:41.

Triwahyuni, Dewi. 2011. Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Makalah Ilmiah Unikom*. 1:37-38.

Ilfana, Zinda Rahma. 2017 *Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mulyana, Budi. 2018. *Religion and International Relations*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 225. International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018). Atlantis Press. Hal 1 – 30.

C. Rujukan Elektronik

ICRC. 2012. Bantuan Bersifat Netral Bagi Korban Kekerasan di Myanmar. Melalui: <http://blogs.icrc.org/indonesia/bantuan-bersifat-netral-bagi-korban-kekerasan-di-myanmar>[11 April 2018]

ICRC. Gerakan. Melalui: <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan>[26 Juli 2018]

ICRC. Sejarah ICRC. Melalui: <http://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah>[23 Juli 2018]

Ira, Astiana. 2018. Anak-Anak Rohingya Kini Bisa Bersekolah Lagi. Melalui <https://www.merdeka.com/dunia/anak-anak-rohingya-kini-bisa-bersekolah-lagi.html>[11 April 2018].

